

**Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi
Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011**

Molas Warsi Nugraheni
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Tidar

Abstract

This research was aimed to review the developing of *bahasa* Indonesia learning model integrated to the anticorruption education in the 7th grade 1st semester of 1 Tembarak State Junior High School. The subject of the research was the semester 1 students of 1 Tembarak State Junior High School. The number of the participant was 40. The research was started by analyzing the students' need by means of delivering the questionnaire and doing interview sessions. The aim of the research was to generate a product, in this case, *abahasa* Indonesia learning model integrated with anti-corruption education.

The researcher conducted several steps in analyzing the data namely taking inventory of the data based on the overall findings, classifying the data, identifying the data based on the found special characteristics, and having reflection. The developmental research was the development of learning model in the form of *bahasa Indonesia* learning material linked to the anti-corruption education. The learning model of *bahasa Indonesia* that had been integrated with the anti-corruption education was tested to the students in the subject class. The result of the test was evaluated in order to see the product effectiveness. Then, the learning model was revised in order to improve the already designed material. This research generated a *bahasa* Indonesia learning model integrated with the anti-corruption education for 7th grade 1st semester students.

Key Words : corruption, education, anti-corruption, integration, development

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini hampir semua aspek kehidupan mulai berubah. Banyak orang mengubah gaya hidupnya. Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Gaya hidup semakin mewah. Hal ini tentu akansangat berbahaya jika tidak disikapi secara bijak. Situasi itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong orang melakukan korupsi. Budaya instan didasari rasa malas mendorong orang untuk melakukan sesuatu demi memperoleh keinginannya dengan mudah.

Dari berbagai hal yang mempengaruhinya, dunia pendidikan pun dituntut secara tidak langsung untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana caranya tentu menjadi tanggung jawab semua pihak. Di sekolah, para guru dan pihak sekolah sendiri memiliki tanggung jawab mendidik anak, tidak hanya dari segi kognitif saja tapi juga afektif dan psikomotorik. Pendidikan tidak bisa hanya memikirkan atau mementingkan segi

intelketualitasnya saja tapi juga dari segi nuraninya. Semua itu harus berkembang dengan seimbang.

Kondisi negara yang dipenuhi dengan pejabat dan orang-orang korup membuat semua rakyat geram. Political and Economy Risk Consultancy atau PERC (Ahmad Sembiring dalam Kompasiana, 2010), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunannya tentang tingkat korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura.

Pemerintah sudah membentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK). Namun, KPK tidak mungkin berhasil memberantas korupsi dengan mudah. Berkaitan dengan hal itu, beberapa tahun lalu SISDIKNAS mencetuskan pendidikan antikorupsi (PAK). Hal ini bertujuan untuk berperan aktif mengurangi dan mencegah timbulnya korupsi. Namun belum ada jalan yang tepat bagaimana menerapkannya. Jika PAK ini menjadi mata pelajaran tersendiri tentu harus dengan pertimbangan yang matang. Selain itu akan timbul masalah baru antara lain sekolah harus menambah jam pelajaran dan mengurangi jam mata pelajaran yang lain, menambah guru, dan membuat kurikulum baru.

Cara untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan menggunakan model pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi dapat mewujudkan tujuan penanaman sikap antikorupsi melalui pendidikan. Sebagai model, peneliti melakukan pengembangan dalam bentuk pengintegrasian materi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP Negeri 1 Tembarak. Alasan dasar mengapa memilih siswa SMP karena masa ini adalah masa peralihan anak dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Masa yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Lalu, bagaimanakah pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi siswa kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi pada dasarnya adalah sebuah tindak kejahatan. Dalam perspektif masyarakat zaman sekarang, terutama berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia, korupsi merupakan penghancur bangsa. Igm Nurdjana(2010) menatakan pengertian korupsi secara harafiah adalah :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wijayanto 2009). Jelas sekali ini merupakan tindakan yang tidak bermoral. Alatas, SH (1987) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik.

Pada dasarnya, korupsi timbul karena sudah menjadi sebuah budaya. Latar belakang/sumber-sumber terjadinya korupsi menurut Rubiyanto (2007) adalah :

- a. Sistem administrasi yang lemah
- b. Kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat
- c. Sikap menerabas
- d. Iman yang lemah
- e. Hukum
- f. Sikap tidak hormat akan hak orang lain
- g. Gotong royong
- h. Sikap egois
- i. Dorongan lain-lain

Lubis dalam Rubiyanto (2007), mengungkapkan beberapa akibat tindakan korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para pejabat yang tidak korup, korupsi semakin meluas, orang sulit berpegang teguh pada norma kejujuran.

- b. Korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga layanan tidak murah
- c. Korupsi dikalangan pejabat menurunkan/menjatuhkan martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan, dan memberi warna jelek pada instansi pemerintah.
- d. Korupsi yang dilakukan oleh para elit, akan mampu mendorong atau menciptakan suasana yang menarik, yang akan semakin mempersubur gerakan korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang sangat berat bagi bangsa Indonesia karena para pelaku korupsi justru dari kalangan pemerintahan. Hal tersebut menjadi contoh yang sangat buruk bagi masyarakat. Masyarakat harus mengetahui beberapa indikasi terjadinya korupsi agar dapat menghindari perbuatan tersebut. DarmaAtmaja dalam buku *Bimbingan dan Konseling untuk SMA dan MA* (2007 : 148-149) menyebutkan beberapa indikasi tindakan korupsi antara lain: sikap tidak jujur, mengambil milik orang lain yang bukan haknya, sikap berpura-pura, sikap menipu, menyembunyikan, menyalahgunakan, dan menyalahgunakan.

Contoh tindakan korupsi menurut Mulyaningtyas adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan curang saat mengerjakan soal ulangan atau ujian yang dilakukan beberapa pelajar dan mahasiswa.
- 2) Skripsi, ijazah, dan gelar yang akhir-akhir ini seperti hal yang sangat mudah untuk dimanipulasi dan dibeli.
- 3) Maraknya kasus “Mafia Peradilan”.
- 4) Laporan pertanggungjawaban yang fiktif.
- 5) Tindakan “asal bapak senang” (ABS), “tahu sama tahu” (TST), “asli tetapi palsu” (ASPAL).
- 6) Tindakan “uang suap, uang semir, uang pelicin, uang tembak”, yang digunakan untuk melancarkan urusan tertentu.

2.2 Menanamkan Sikap Antikorupsi

Ketua Umum Gerakan Pendidikan Anti Korupsi (Gepak) Thariq Mahmud (Ruslan Burhani, *Antarnews.com/3 Mei 2010*) berpendapat, penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi kepada para siswa di sekolah bisa menjadi salah satu jawaban untuk melawan praktik korupsi melalui sarana pendidikan sedini mungkin. Hal ini perlu keterlibatan banyak pihak, tidak hanya menjadi tanggungan bagi sekolah saja.

Ada tiga aspek penting dalam menanamkan sikap antikorupsi pada anak didik yaitu keluarga, masyarakat/lingkungan sekitar, dan sekolah. Peran ketiganya sangat besar dalam membentuk kepribadian anak. Baik dan buruknya tindakan mereka sebagian besar bahkan boleh dikatakan hampir pasti dipengaruhi oleh tiga aspek tersebut. Jika ketiga aspek itu baik, anak juga akan bertumbuh dan berkembang menjadi baik, begitu pula sebaliknya.

2.3 Pendidikan Karakter sebagai Sarana Penanaman Budi Pekerti

Furqon Hidayatullah (2010 : 22), menyatakan bahwa pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter kuat setiap peserta didik (siswa) sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya.

Pendidikan karakter menurut Dharma Kesuma, dkk (2011:5-6), dalam konteks kajian P3, yang didefinisikan dalam setting sekolah adalah sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Ia menjelaskan juga bahwa definisi tersebut dapat mengandung makna (1) pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran, (2) diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh karena anak merupakan suatu potensi yang perlu dan wajib dikembangkan, (3) penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk oleh sekolah. Nilai-nilai yang hendaknya dapat dimasukkan sebagai landasan pembentuk karakter bagi peserta didik menurut Indonesia Heritage Foundation dalam Dharma Kesuma (2011: 14) adalah seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Nilai-nilai Karakter Bangsa

No.	Karakter
1.	Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya
2.	Kemandirian dan tanggung jawab
3.	Kejujuran, bijaksana
4.	Hormat dan santun
5.	Dermawan, suka menolong dan gotong royong
6.	Percaya diri, kreatif dan pekerja keras
7.	Kepemimpinan dan keadilan

8.	Baik dan rendah hati
9.	Toleransi, kedamaian dan kesantunan

Pusat Pengkajian Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia (P3 UPI), mempersingkat nilai-nilai di atas yang dianggap sangat penting untuk dapat membangun bangsa Indonesia, yaitu bersikap jujur, kerja keras, dan ikhlas.

Beberapa sikap yang dipaparkan tersebut akan dimasukkan sebagai landasan utama untuk pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan pengertian pendidikan karakter bangsa, sikap-sikap yang perlu dimiliki siswa, dapat menjadi tolok ukur bagi penulis untuk menentukan tema serta materi yang sesuai bagi siswa.

2.4 Membentuk Pribadi Antikorupsi Melalui Pendidikan

Membentuk pribadi antikorupsi dan kebal terhadap tindakan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah. Hal yang harus dilakukan adalah membangunnya secara terus-menerus dari usia sedini mungkin. Hal tersebut dapat dimulai dengan memberikan pendidikan di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan batu pijakan pertama yang menentukan perkembangan moral anak, namun, kegunaannya cukup terbatas terutama dalam hal semangat disiplin. Rasa hormat terhadap peraturan hampir tidak berkembang dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut menjadi peran sekolah untuk dapat mewujudkannya (Durkheim via Wijayanto, 2009).

Menurut Ismail (dalam Wijayanto: 2009), secara umum sekolah sebagai sarana pendidikan sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama yaitu (1) sebagai sarana transfer ilmu, (2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, (3) penguasaan *life skill* dan teknologi, (4) sarana pembangunan karakter. Fungsi pendidikan tersebut seharusnya dapat berjalan dengan proporsi yang sama sehingga dapat menghasilkan *output* yang berkompeten dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada dasarnya pendidikan tidak hanya mengutamakan hasil serta kompetensi kognitif saja, melainkan juga kompetensi afektif dan psikomotorik sehingga selain kognitif yang baik, anak didik juga memiliki jiwa dan karakter yang luhur.

2.5 Pendidikan Antikorupsi Melalui Jalur Pendidikan Formal (sekolah)

Pendidikan dalam arti luas, pada hakikatnya akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia,

yaitu melalui perbaikan akal budi (Wijayanto 2009). Hakikat mengenai pendidikan yang telah diuraikan di atas menjadi sebuah tantangan apakah melalui pendidikan, tindakan korupsi dapat dicegah atau tidak. Menurut Fatwiyati Solikhah (Kompas, 6 Mei 2011), faktor umum yang mempengaruhi perilaku para remaja (siswa) untuk dapat melakukan tindakan korupsi adalah adanya kecurangan yang tidak diberantas sejak usia dini.

Oleh karena hal itu, Fatwiyati yang merupakan seorang psikolog juga mengungkapkan bahwa harus ada pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi melalui penyisipan di setiap pelajaran sekolah, dengan harapan dapat membentuk karakter serta pemikiran para siswa sebagai generasi penerus bangsa untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut.

Melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dimulai sejak usia dini di jenjang sekolah diharapkan dapat menjembatani usaha meminimalisasi praktek korupsi karena pada hakikatnya pendidikan adalah memperbaiki kualitas kemanusiaan, melalui perbaikan akal dan budi.

3. METODE PENGEMBANGAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis pengembangan, yaitu pengembangan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP.

3.2 Model Pengembangan

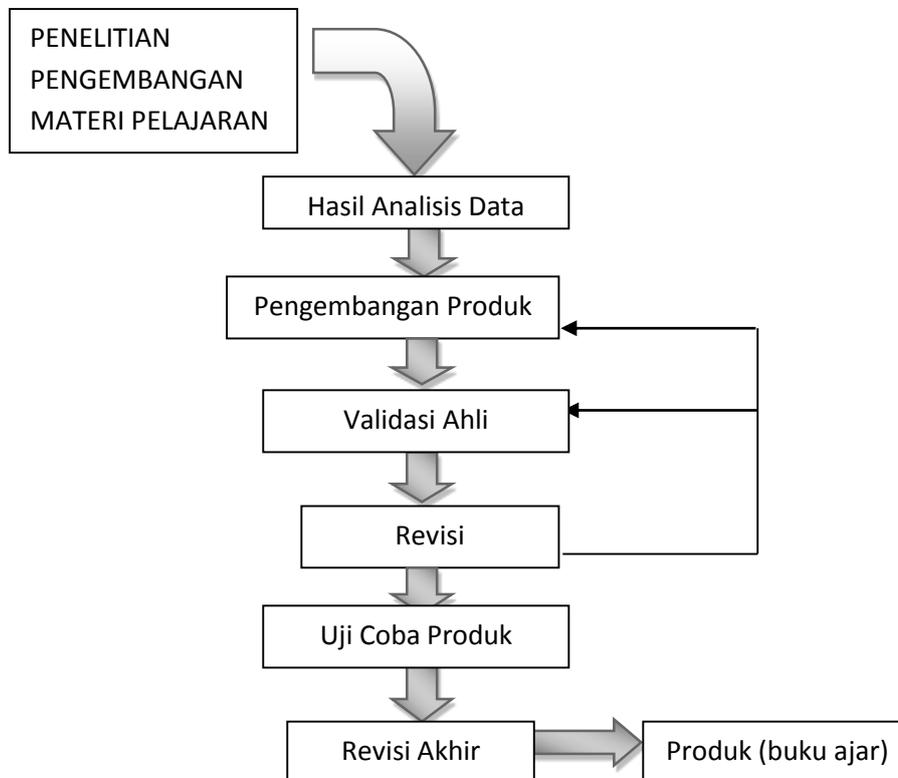
Model pengembangan yang diacu dalam penelitian ini adalah model prosedural yang bersifat deskriptif. Model deskriptif menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk yang berupa model /buku pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas VII semester 1. Pengembangan model buku ajar dalam penelitian ini disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi pembelajaran yang akan dicantumkan dalam model buku ajar disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertera dalam KTSP tersebut.

3.3 Prosedur Pengembangan Produk

Prosedur pengembangan disusun atas dasar hasil analisis data. Rancangan prosedur pengembangan materi pembelajaran mengacu pada model pengembangan yang telah dikembangkan oleh Pranowo. Model pengembangan tersebut mengadaptasi prosedur pengembangan yang telah dilakukan oleh Borg & Gall, Dick & Carey dan Luther

sehingga menghasilkan sebuah model pengembangan yang lebih sederhana, yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Secara garis besar model pengembangan ini dapat dilihat pada bagan 3.1 berikut:

Bagan 3.1



3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa angket analisis kebutuhan mengenai persepsi siswa terhadap sikap antikorupsi yang dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Selain itu, terdapat angket mengenai topik-topik pembelajaran antikorupsi yang sesuai dengan keinginan siswa dan instrumen penilaian produk pengembangan untuk mendapat masukan mengenai produk dari siswa, dan pedoman wawancara guru dan siswa. Instrumen penelitian berupa :

a. Kuesioner

Kuesioner awal yang akan dibagikan kepada siswa ada 2 buah kuesioner, kuesioner pertama untuk mengetahui kondisi awal siswa, tanggapan siswa mengenai sikap dan perilaku korupsi di Indonesia, dan kuesioner yang kedua untuk mengetahui topik-topik apa saja yang diinginkan dan diminati oleh siswa sebagai pembentuk tema dalam modul pembelajaran antikorupsi.

Tabel 3.1
Lembar Instrumen Persepsi Siswa Terhadap Terjadinya Korupsi di Indonesia

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		1	2	3	4
1	Ketika mengajar, guru bahasa Indonesia saya menanamkan nilai kejujuran kepada siswa agar tidak tumbuh bibit korupsi di kalangan siswa.				
2	Materi pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan di kelas saya selalu difokuskan pada masalah bahasa dan sastra, tetapi isinya berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran agar siswa tidak korupsi.				
3	Ketika mengajar bahasa Indonesia, guru saya mengutamakan penguasaan materi pelajaran pada siswa.				
4	Ketika mengajar bahasa Indonesia, guru saya juga memberikan sisipan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, budi pekerti luhur, dll.				
5	Guru bahasa Indonesia saya terkesan tidak memiliki tanggung jawab terhadap terjadinya korupsi di Indonesia.				
6	Materi yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia saya selalu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari				
7	Teks bacaan yang diberikan oleh guru saya ada yang berkaitan dengan masalah kejujuran.				
8	Pendidikan anti korupsi juga ikut diajarkan melalui pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.				
9	Sikap teman-teman saya bila membicarakan masalah korupsi cenderung anti korupsi.				
10	Ada teman saya yang berpihak kepada koruptor ketika sedang membicarakan korupsi.				

Keterangan :

1. Untuk jawaban **selalu**
2. Untuk jawaban **tidak pernah**
3. Untuk jawaban **kadang-kadang**
4. Untuk jawaban **tidak tahu**

Tabel 3.2
Lembar Instrumen Topik Antikorupsi

No	Topik	Setuju	Tidak Setuju
1	Nasihat untuk tidak korupsi		
2	Menghargai prestasi sebagai bentuk keadilan		
3	Biasakan memberi, jangan meminta		
4	Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi		
5	Menggunakan uang iuran kelas untuk kepentingan pribadi menjadi bibit korupsi		
6	Menyontek ketika ulangan, menyemai bibit korupsi pada diri sendiri		
7	Berpikir kreatif, menjauhkan sikap berani korupsi		
8	Koruptor sebagai penghianat bangsa		
9	Lebih baik hidup miskin dari pada makan uang haram		
10	Memberi remisi (ampunan) pada nara pidana korupsi adalah kebesaran jiwa suatu bangsa		
11	Berilah upah kepada pekerja sebelum keringat kering		
12	Menumbuhkan kemandirian agar hidup jujur		
13	Hukuman mati buat koruptor kelas kakap		
14	Kejujuran musuh utama koruptor		
15	Semangat bekerja keras		

16	Semangat cinta tanah air		
17	Taat beribadah sebagai penangkal korupsi		
18	Koruptor lebih jahat daripada teroris		
19	Peranan media massa terhadap pemberantasan korupsi		
20	Menayangkan wajah koruptor bersama keluarganya di televisi		
21	Keteladanan pimpinan untuk tidak korupsi		
22	Kenaikan gaji bagi pejabat negara		
23	Menumbuhkan rasa handarbeni terhadap bangsa dan negara		
24	Menanamkan rasa nasionalisme pada bangsanya		
25	Mewajibkan setiap pejabat untuk menulis dengan topik "seandainya saya bukan koruptor"		

Keterangan :

1. Untuk jawaban **selalu**
2. Untuk jawaban **tidak pernah**
3. Untuk jawaban **kadang-kadang**
4. Untuk jawaban **tidak tahu**

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran serta beberapa anak. Wawancara kepada guru untuk mengetahui seberapa besar kepedulian guru terhadap kasus korupsi serta seberapa jauh guru mengaitkan antara materi dengan penanaman sikap antikorupsi. Wawancara kepada siswa dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan sikap siswa terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tabel 3.3
Lembar Pedoman Wawancara Guru

NO	KOMPONEN PERTANYAAN
1	Bagaimana sikap Anda terhadap korupsi yang ada di Indonesia?
2	Tindakah apa yang Anda lakukan untuk menanamkan nilai-nilai luhur agar siswa Anda tidak melakukan korupsi di masa mendatang?
3	Bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai luhur melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia?
4	Apakan nilai-nilai ;luhur yang Anda tanamkan kepada siswa dieksplisitkan dalam penjabaran materi pada RPP?
5	Agar sikap antikorupsi tumbuh dalam diri siswa, apakah Anda merumuskan secara eksplisit dalam domain pendidikan (kognitif, afektif, psikomotorik)?
6	Apakah Anda pernah meilih teks bacaan atau teks sastra yang berkaitan dengan antikourpsi?

Tabel 3.4
Lembar Pedoman Wawancara kepada Murid

No	Kisi-Kisi
1.	Pandangan dan sikap siswa mengenai kasus korupsi di Indonesia

2.	Sanksi yang sesuai untuk seorang koruptor
3.	Cara pencegahan korupsi menurut pandangan siswa
4.	Pandangan siswa apabila penanaman sikap antikorupsi ditanamkan sejak duduk di bangku sekolah
5.	Pandangan siswa mengenai kepedulian guru terhadap kasus korupsi dengan cara memasukkan dalam materi pelajaran

3.5 Teknik analisis data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah sebagai berikut: (1) inventarisasi data terhadap seluruh data yang sudah dikumpulkan, (2) klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, (3) identifikasi data (berdasarkan ciri-ciri khas yang ditemukan dalam data), (4) refleksi (memaknai seluruh data yang sudah dianalisis untuk menentukan tindak lanjut), (5) pemaknaan hasil analisis data (untuk memberi arti apakah hasil analisis data akan berguna untuk dikembangkan lebih lanjut ataukah masih harus direvisi untuk menyempurnakan program).

Peneliti menganalisis data siswa SMP Negeri 1 Tembarak, kelas VII semester 1, dengan cara mempresentase hasil jawaban siswa. Rumus yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung persentase tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pilihan siswa}}{\text{Jumlah siswa seluruhnya}} \times 100\%$$

3.6 Hasil analisis dan pembahasan

Secara tegas siswa kelas VII SMP N 1 Tembarak menolak korupsi dan mengharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para koruptor seperti hukuman penjara atau hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siswa masih memiliki cara pandang yang baik mengenai sikap antikorupsi. Keadaan ini harus dimanfaatkan dengan baik ketika menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebelum mereka terkontaminasi dengan perbuatan dan sikap yang menjadi bibit korupsi.

Siswa juga memiliki harapan untuk memberantas korupsi melalui pendidikan formal di sekolah. Namun, kenyataannya selama ini pihak sekolah khususnya guru belum memfasilitasinya. Guru belum mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke

dalam pelajaran di kelas.

3.7 Pengembangan produk

Pengembangan produk dilakukan berdasarkan hasil analisis data termasuk topik-topik yang dipilih oleh murid-murid. Pengembangan prototipe pembelajaran terintegrasi dengan pendidikan antikorupsi lalu diuji coba dengan menggunakan salah satu bab dari buku karena keterbatasan waktu yang ada di sekolah. Pengembangan prototipe ini juga berdasarkan temuan-temuan yang didapat selama penelitian termasuk juga hasil kuesioner.

Dari uji coba disimpulkan ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu kesalahan pengetikan, ada beberapa kalimat yang susah dimengerti, dan contoh yang harus diperbanyak. Guru memberikan penilaian yang menyebutkan bahwa semuanya sudah sangat baik dan inovatif. Beliau menyarankan lebih kreatif lagi dalam mengembangkan modul pembelajaran dengan tidak mengabaikan bobot dari materi pembelajaran yang akan diberikan.

Secara keseluruhan tanggapan siswa terhadap produk yang berisi pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas VII semester 1 baik. Antusiasme siswa sangat tinggi sekali. Hal ini dapat dilihat dan disimpulkan dari jawaban siswa berdasarkan angket yang diisi setelah materi pembelajaran diujicobakan. Siswa yang menjawab baik dan sangat baik sebanyak 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan disimpulkan bahwa uji coba materi pembelajaran antikorupsi berhasil. Dari hasil uji coba produk dan saran-saran dari guru dan murid peneliti mengembangkan dan memperbaiki prototipe menjadi produk yang utuh berupa buku pembelajaran.

4. SIMPULAN

Pengembangan materi pendidikan antikorupsi terintegrasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang penting. Penelitian ini berusaha untuk melakukan terobosan yang menjadikan pendidikan antikorupsi itu tidak sekedar berupa nasehat dan anjuran saja, tapi benar-benar tertanam dalam diri anak bersama dengan penguasaan kompetensi berbahasa. Beberapa saran yang baik untuk diperhatikan dalam pengembangan materi pendidikan antikorupsi terintegrasi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia adalah :

1. Buku teks harus sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang sedang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan efek negatif, seperti pembelajaran yang

melenceng dari kurikulum yang berlaku, beban belajar siswa yang makin berat, dan alokasi anggaran negara membengkak karena harus menambah guru pendidikan antikorupsi.

2. Nilai-nilai anti korupsi diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran atas dasar kompetensi dasar (KD) yang sesuai dengan kelas dan semester.
3. Dalam memilih tema harus memilih tema yang secara langsung dapat membentuk jiwa siswa yang tangguh agar tidak mudah tergoda melakukan korupsi.
4. Dalam mendesain materi pembelajaran, domain afektif, kognitif, dan psikomotorik harus seimbang.
5. Pengembangan model pembelajaran antikorupsi dalam bentuk teks bagi siswa SMP harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari siswa dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sembiring. "Indonesia Juara Korupsi".
<http://sosbud.kompasiana.com/2010/06/02/indonesia-juara-korupsi/>
- Alatas, S.H. 1987. *Korupsi*. Jakarta : LP3S.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: BNSP.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyogo, Wasis D. 2004. Modul Lokakarya: *Konsep Penelitian dan Pengembangan*. Universitas Negeri Malang.
- Harmanto. 2008. *Mencari Model Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa SMP dan MTs*. Makalah Simposium Nasional Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya. Depdiknas.
- Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kesuma, Dharma, dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membedakan*. Jakarta: KPK
- Maheka, Arya. tanpa tahun. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Indonesia: KPK.
- Mulyaningtas, Renita dan Yusup Purnomo. 2007. *Bimbingan dan Konseling untuk SMA dan MA kelas XI*. Jakarta : Erlangga.
- Muslich, Masnur. 2007. *KTSP: Dasar Pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi

Aksara.

Muthe, Bermawi. 2009. *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Intan Madani.

Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nurdiyantoro, Burhan. 2009. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: BPFE.

Pendidikan Anti Korupsi Salah Satu Model Pendidikan Karakter.
<http://niamw.wordpress.com/> (diakses tanggal 7 Maret 2011 pukul 11.35).

Pengertian Intergrasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial (diakses pada tanggal 8 Maret 2011 pukul 21.10).

Pranowo. 2010. *Model Pembelajaran Antikorupsi Terintegrasi dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Rachmadin Ismail. "Anggota DPR Jadi 'Juara' Korupsi di Tahun 2010"
<http://www.detiknews.com/read/2011/03/07>.

Rahmanto, B Dkk. 2005. *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Rubiyanto, PA. 1997. *Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya, dan Etika Lintas Budaya*. Jurnal Ilmiah Widya Dharma.

Ruslan Burhani. "Pendidikan Anti Korupsi Harus Dikenalkan Sejak Dini" Antara News.com. 3 Mei 2010.

Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.

Seno, Agnes Jatu Resani. 2009. *Pengembangan Silabus dan Materi Pembelajaran Keterampilan Menulis untuk Siswa Kelas X Semester 2 SMA Sang Timur Yogyakarta*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: USD.

Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.